**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: humas@kemenkopangan.go.id

**SIARAN PERS**
**No.347/SES.M.PANGAN/SP/11/2026**

# "Pascapenandatanganan IEU-CEPA, Indonesia dan Uni Eropa Percepat Kesiapan Kerja Sama Pangan demi Akses Pasar yang Lebih Luas"

*Rangkaian kunjungan Delegasi Uni Eropa pada 23–25 November 2026 menghasilkan matriks pemantauan bersama aplikasi akses pasar, persiapan Komite SPS, dan usulan peningkatan kapasitas yang manfaatnya ditujukan bagi UMKM, petani, peternak, pembudidaya, dan nelayan.*

**Jakarta, 25 November 2026** – Hanya dua hari setelah Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IEU-CEPA) di Brussel pada 21 November 2026, kedua pihak langsung bergerak menyiapkan implementasinya di sektor pangan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menerima kunjungan Delegasi Uni Eropa yang dipimpin Kepala Unit Direktorat Jenderal Perdagangan (DG TRADE) Komisi Eropa, Flavio Coturni, dan Kepala Unit Direktorat Jenderal Kesehatan dan Keamanan Pangan (DG SANTE), Caroline Boeshertz, bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Hervé Delphin.
Kunjungan tiga hari ini berfokus pada Bab Sanitary and Phytosanitary (SPS) IEU-CEPA, yaitu ketentuan tentang keamanan pangan, kesehatan hewan, dan kesehatan tumbuhan. Bab ini menentukan apakah produk pangan, pertanian, dan perikanan kedua pihak benar-benar dapat masuk ke pasar masing-masing setelah tarif diturunkan.

Rangkaian kunjungan diawali Plenary Meeting di Kantor Kemenko Pangan, Senin (23/11), yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Dandy Satrya Iswara, selaku Ketua Delegasi Indonesia, didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga, Bara Krishna Hasibuan. Pertemuan dihadiri pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perdagangan.
Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan: pemantauan seluruh aplikasi akses pasar kedua arah dalam satu matriks bersama lengkap dengan langkah lanjut dan jadwal indikatif; pertemuan bilateral teknis pada 24–25 November; persiapan pertemuan pertama Komite SPS IEU-CEPA dan Technical Working Group; serta usulan paket peningkatan kapasitas dari Indonesia berdasarkan Bab 16 dan 17 IEU-CEPA.

"Penandatanganan di Brussel telah membuka pintu. Tugas kita sekarang memastikan pada saat perjanjian berlaku, eksportir, petani, dan nelayan kita dapat langsung melewatinya, dan mitra Eropa dapat melakukan hal yang sama di Indonesia," ujar Dandy.
Dalam kerangka IEU-CEPA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan perjanjian secara keseluruhan, termasuk proses ratifikasi bersama Kementerian Perdagangan selaku juru runding. Kemenko Pangan mengoordinasikan implementasi di sektor pangan, khususnya Bab SPS, sebagai simpul koordinasi utama, sementara kewenangan teknis tetap berada pada kementerian dan lembaga masing-masing.

Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawal percepatan ratifikasi agar IEU-CEPA dapat berlaku tepat waktu pada Januari 2027.

Pada malam harinya, Delegasi Uni Eropa menggelar Networking Dinner di Ayana Midplaza Jakarta yang mempertemukan sekitar 100 tamu, terdiri atas pejabat pemerintah, asosiasi dan kamar dagang Indonesia, EuroCham, serta perusahaan Eropa di sektor pangan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengajak Uni Eropa membangun kemitraan berbasis kepercayaan dan sains, sistem pangan berkelanjutan, serta investasi pada sumber daya manusia dan nilai tambah. "Ketika produsen kecil Indonesia berhasil di Eropa, dan investor Eropa berhasil di Indonesia, perjanjian ini memenuhi janjinya," ujar Hanif.

Pada 24–25 November, Delegasi Uni Eropa melanjutkan pertemuan bilateral teknis yang diselenggarakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya, dengan pendampingan Kemenko Pangan:

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP): mutu hasil perikanan dan pendaftaran unit pengolahan ikan;
- Badan Karantina Indonesia: persyaratan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- Kementerian Pertanian: kesehatan hewan dan produk asal hewan;
- Badan Pangan Nasional: keamanan pangan segar; dan
- Kementerian Perdagangan: akses pasar dan promosi perdagangan.

IEU-CEPA membuka peluang besar bagi produk pangan Indonesia. Sesuai data Kemenko Perekonomian, 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia akan mendapat bea masuk 0 persen saat perjanjian berlaku. Menurut Komisi Eropa, perdagangan barang kedua pihak pada 2025 mencapai €28,9 miliar.

Kerja sama SPS memastikan tarif nol tersebut diikuti akses pasar yang nyata. Bagi pelaku usaha, prosedur yang lebih jelas dan dapat diprediksi berarti kepastian dalam merencanakan ekspor. Bagi UMKM, nelayan, pembudidaya, peternak, dan petani, usulan peningkatan kapasitas yang disampaikan Indonesia mencakup pelatihan keamanan pangan, pemantauan residu produk budidaya, sertifikat ekspor elektronik, keterhubungan sistem sertifikasi hasil tangkapan ikan dengan sistem Uni Eropa, serta pendampingan memenuhi persyaratan pasar Eropa bersama asosiasi dan EuroCham.

Perjanjian ini juga berlaku dua arah. Produk Eropa yang masuk ke Indonesia tetap melalui analisis risiko dan persyaratan karantina nasional, sehingga perlindungan konsumen serta kesehatan hewan dan tumbuhan di dalam negeri tetap terjaga.

Kedua pihak akan memperbarui matriks pemantauan bersama berdasarkan hasil pertemuan bilateral, menyiapkan pertemuan pertama Komite SPS IEU-CEPA, dan menindaklanjuti usulan peningkatan kapasitas yang akan disampaikan Indonesia secara tertulis. Ringkasan kesimpulan Plenary Meeting akan dikonfirmasi bersama dengan Delegasi Uni Eropa.

---

**Narahubung**

Dr. Gunawan, S.T., M.Si.
Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat